



DAMPAK PUNGUTAN LIAR DALAM LAYANAN PUBLIK

DISAMPAIKAN PADA ACARA *WORKSHOP*
‘PERAN APIP DALAM PENCEGAHAN PUNGUTAN LIAR
PADA LAYANAN PUBLIK’

SATGAS SABER PUNGGLI Jakarta, 12 Januari 2017



FAKTA FENOMENA DUNIA YG BERPENGARUH



DEMOKRATISASI

SEJAK 1998

- Samuel Huntington
- Francis Fukuyama



MENGUATNYA LEGISLATIF

MENGUATNYA MEDIA

MENGUATNYA CIVIL SOCIETY
& LEMBAGA INTERNASIONAL

TUNTUTAN KEBEBASAN INDIVIDU (HAM)

GLOBALISASI

- Alvin Toffler



MENUJU MASYARAKAT INFORMASI



DEMOKRASI

KEKUASAAN
DITANGAN RAKYAT

VS

- OTOKRASI
- OLIGARKHI

SEMUA ELEMEN
NEGARA SURVIVE
UTK



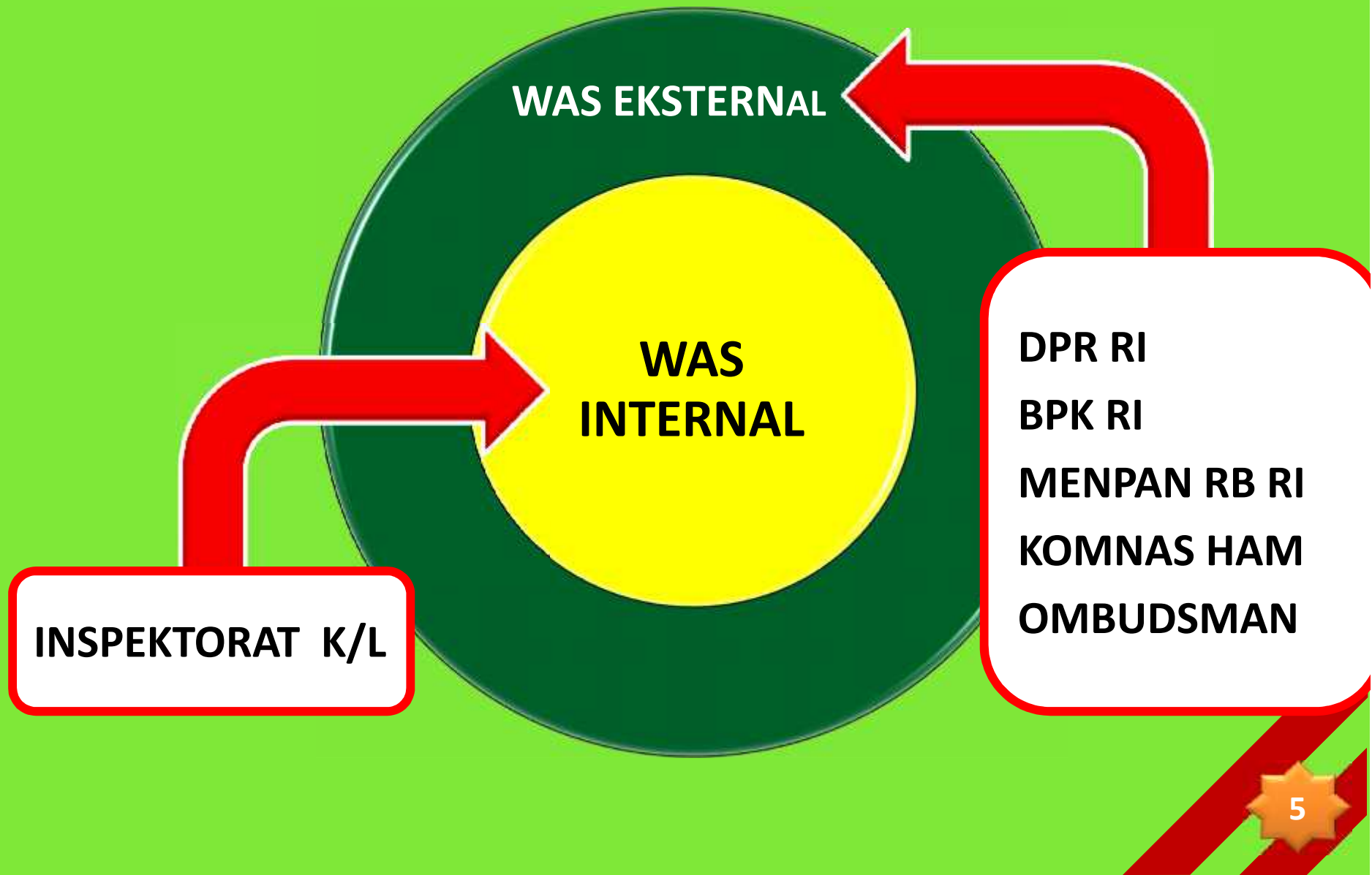
PUBLIC TRUST

PUBLIC LEGITIMACY





FUNGSI PENGAWASAN





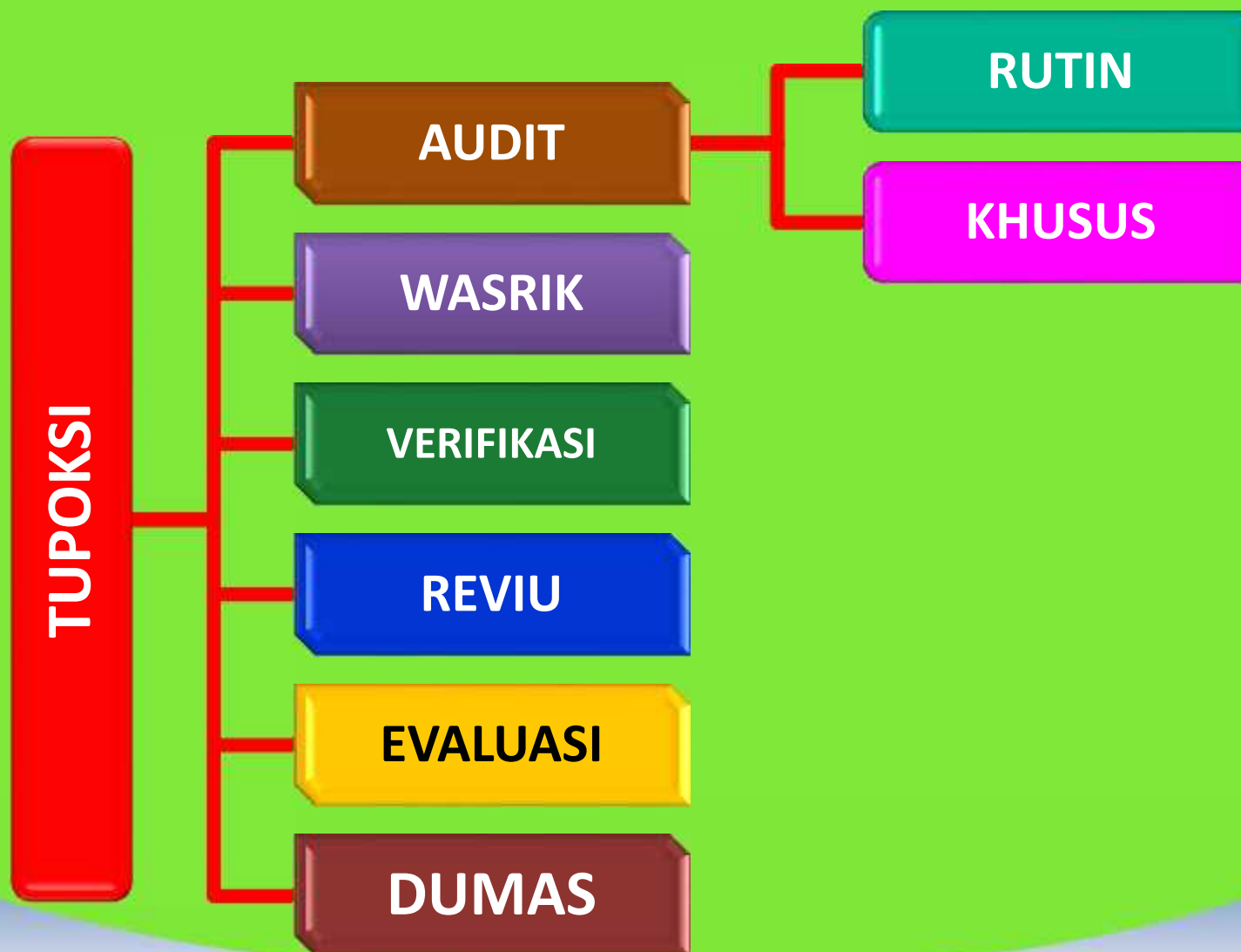
PENGAWASAN INTERN



Seluruh proses kegiatan **audit, reviu, evaluasi, pemantauan,** dan **kegiatan pengawasan lain** terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan **keyakinan yang memadai** bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien **untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.**



IMPLEMENTASI PENGAWASAN





PENGERTIAN



PUNGLI ?



ADALAH PENGENAAN BIAYA ATAU **PUNGUTAN** DI **TEMPAT YANG SEHARUSNYA TIDAK ADA BIAYA** DIKENAKAN ATAU DI PUNGUT DI LOKASI ATAU PADA KEGIATAN TERSEBUT TIDAK SESUAI KETENTUAN.

SEHINGGA DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI **KEGIATAN MEMUNGUT BIAYA ATAU MEMINTA UANG SECARA PAKSA** OLEH SESEORANG KEPADA PIHAK LAIN DAN HAL TERSEBUT MERUPAKAN SEBUAH PRAKTEK KEJAHATAN ATAU PERBUATAN PIDANA.



KERAWANAN/RENTAN PUNGLI

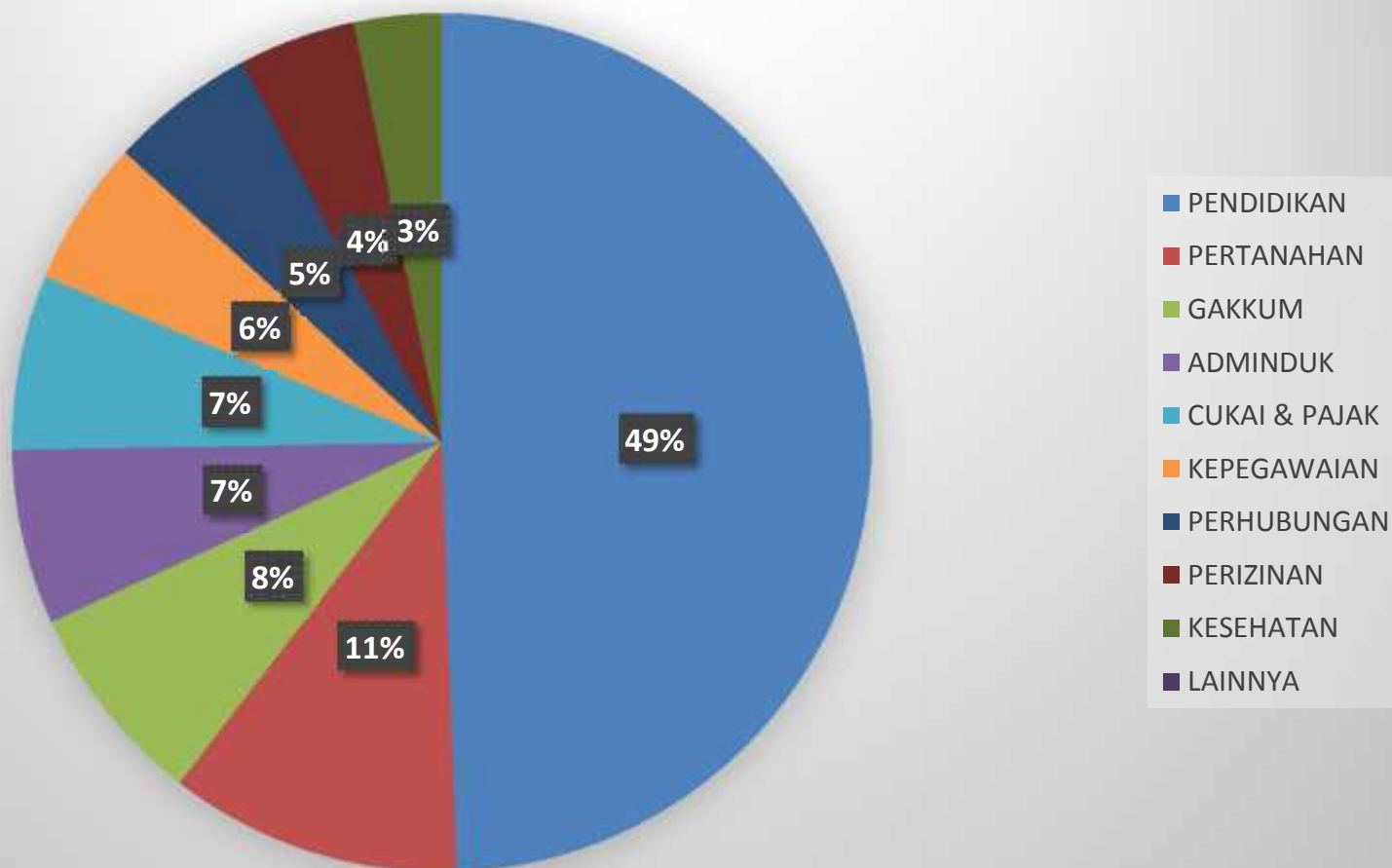




DATA LAPORAN MASUK DI OMBUDSMAN RI TH 2016



DUGAAN PUNGLI



SUMBER : DATA OMBUDSMAN RI 2016



KERAWANAN PUNGLI DI DIKBUD



CONTOH

KEPEGAWAIAN

IZIN BEKERJA BIDANG PENDIDIKAN
UNTUK PEKERJA ASING

PENENTUAN CALON PESERTA
SERTIFIKASI

PENYALURAN DANA BANTUAN
KUALIFIKASI S1 DAN BEASISWA
PROGRAM S2

PROSES PENETAPAN PENILAIAN
ANGKA KREDIT (PAK)

MUTASI/PROMOSI KEPALA SEKOLAH

REKRUTMEN CPNS



PENYEBAB KORUPSI/PUNGLI



GONE



GREEDY
(KESERAKAHAN)

OPPORTUNITY
(KESEMPATAN,
KEWENANGAN)

NEED
(KEBUTUHAN)





DAMPAK PUNGLI



- ❖ EKONOMI BIAYA TINGGI
- ❖ RUSAKNYA TATANAN MASY
- ❖ CIPTAKAN MSL SOSIAL & KESENJANGAN SOSIAL
- ❖ HAMBAT PEMBANGUNAN
- ❖ MASYARAKAT DIRUGIKAN
- ❖ MENIMBULKAN KETIDAK PERCAYAAN MASY KPD PEMERINTAH





PELAYANAN PUBLIK



**PELAYANAN PUBLIK MENURUT UU NO.25 TH 2009
KEGIATAN/RANGKAIAN KEGIATAN DALAM RANGKA
PEMENUHAN KEBUTUHAN PELAYANAN SESUAI
DENGAN PERATURAN PER-UU BAGI SETIAP WARGA
NEGARA & PENDUDUK ATAS BRG, JASA DAN/ATAU
PELAYANAN ADMINISTRATIF YG DISEDIAKAN OLEH
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK**



ASAS PELAYANAN PUBLIK



1. **KEPENTINGAN UMUM;**
2. **KEPASTIAN HUKUM;**
3. **KESAMAAN HAK;**
4. **KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN;**
5. **KEPROFESIONALAN;**
6. **PARTISIPATIF;**
7. **PERSAMAAN PERLAKUAN/TIDAK DISKRIMINATIF;**
8. **KETERBUKAAN;**
9. **AKUNTABILITAS;**
10. **FASILITAS DAN PERLAKUAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN;**
11. **KETEPATAN WAKTU; DAN**
12. **KECEPATAN, KEMUDAHAN, DAN KETERJANGKAUAN.**



UPAYA YANG SUDAH DILAKUKAN



**PUNGLI BELUM
HILANG 100% !!**





PERATURAN PRESIDEN



PUNGLI SUDAH
MERUSAK SENDI
KEHIDUPAN BERMASY,
BERBGS & BERNEGARA



TERBITKAN
PERPRES 87 TH 2016
TTG PEMBENTUKAN
SATGAS SABER PUNGLI



TUGAS SATGAS SABER PUNGLI



TUGAS

MELAKSANAKAN
PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN
DENGAN MENGOPTIMALKAN
PEMANFAATAN PERSONIL, SATUAN
KERJA DAN SARANA PRASARANA,
BAIK YANG BERADA DI
KEMENTERIAN/LEMBAGA MAUPUN
PEMERINTAH DAERAH.

FUNGSI

- ❖ INTELIJEN;
- ❖ PENCEGAHAN;
- ❖ PENINDAKAN; DAN
- ❖ YUSTISI.

SASARAN

SENTRA PELAYANAN PUBLIK DI
KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMDA

KEKUATAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA & PEMDA



STRATEGI CEGAH & BERANTAS PUNGLI



STRATEGI PRE EMPTIF (PEMBINAAN)

- MEMBANGUN BUDAYA ANTI PUNGLI BAIK MASY, APARATUR MAUPUN PENGUSAHA
- MENINGKATKAN SOSIALISASI KEPADA MASY DLM GERAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN PUNGLI, PEMDA BEBAS DARI PUNGLI

STRATEGI PENCEGAHAN

- MELAK PEMETAAN RAWAN PUNGLI DI SETIAP K/L & PEMDA
- MENGOPTIMALKAN FUNGSI SAT WAS INTERNAL BAIK WAS MELEKAT WAS FUNGSIONAL INTERN DGN JADWAL & PRIORITAS YG TERARAH
- MENGOPTIMALKAN SISTEM PELAYANAN PUBLIK YG PRIMA BERBASIS TEKNOLOGI & INFORMASI

STRATEGI REPRESIF (PENEGAKAN HUKUM)

- MENINDAK TEGAS THDP OKNUM APARAT PENYELENGGARA NEGARA/PEGAWAI NEGERI, MASY YG TERLIBAT DLM PUNGUTAN LIAR SESUAI KETENTUAN PER UU YG BERLAKU



PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)



1

APIP SEBAGAI KONSULTAN (SOLUTIVE), TIDAK HANYA MENEMUKAN MASALAH TETAPI JUGA MEMBERI SOLUSI/KONSULTASI LANGSUNG DI LAPANGAN

2

APIP SEBAGAI PENGAWAL PENJAMIN KINERJA → (QUALITY ASSURANCE)

3

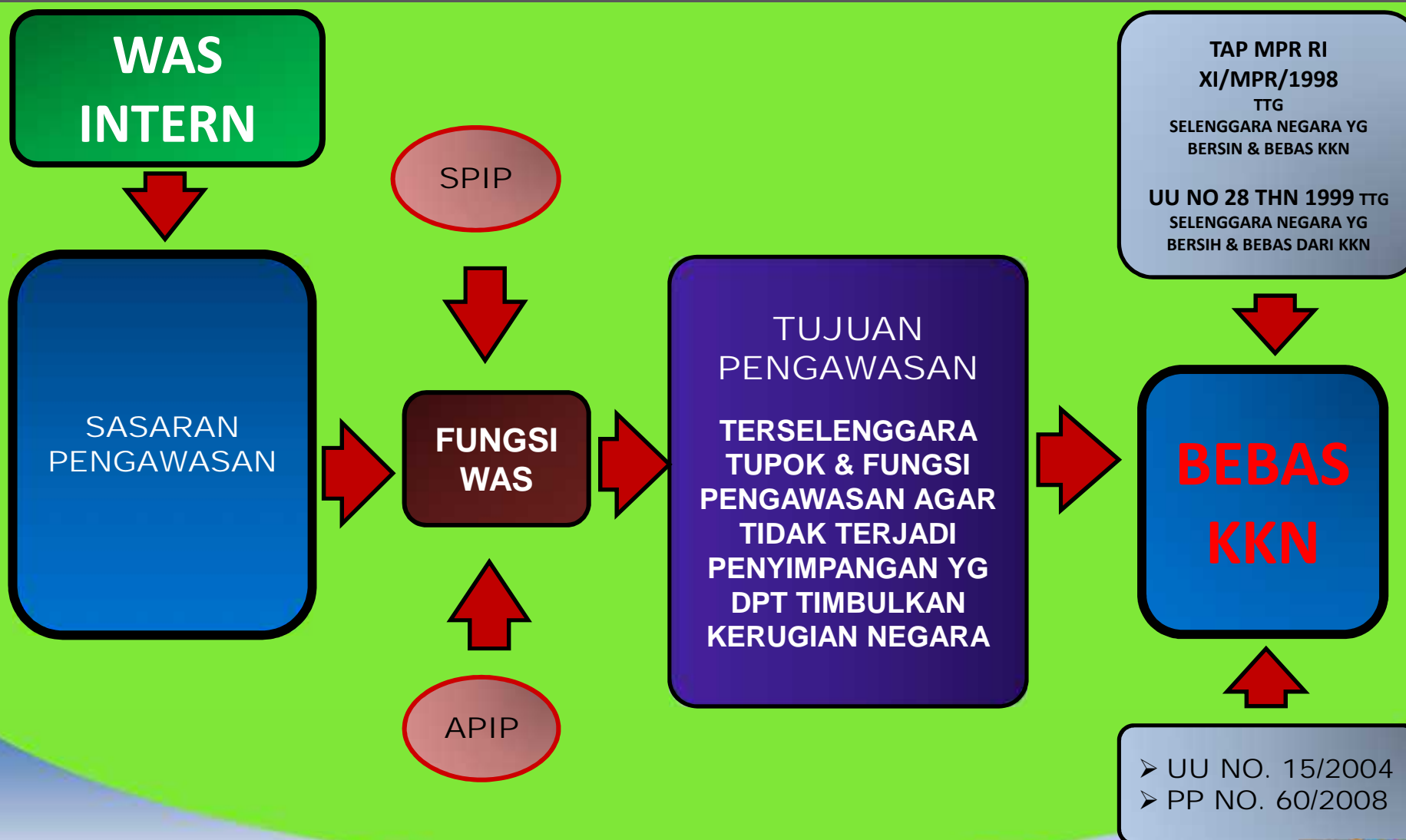
APIP MENDUKUNG IME (INTERNAL MENDUKUNG EKSTERNAL) DAN EMI (EKSTERNAL MEMANFAATKAN INTERNAL), DALAM HAL INI TIDAK MENUTUPI DATA GUNA MERAHAI KEPERCAYAAN PEMERINTAH, PUBLIK DAN LEMBAGA PENGAMAT PEMERINTAH.

4

APIP MEMBANGUN KREDIBILITAS OBRIK DARIPADA MELAKUKAN PENGHUKUMAN (NAMUN EKSIS, KONSISTEN & KONSEKUEN)



MANAGEMENT PENGAWASAN

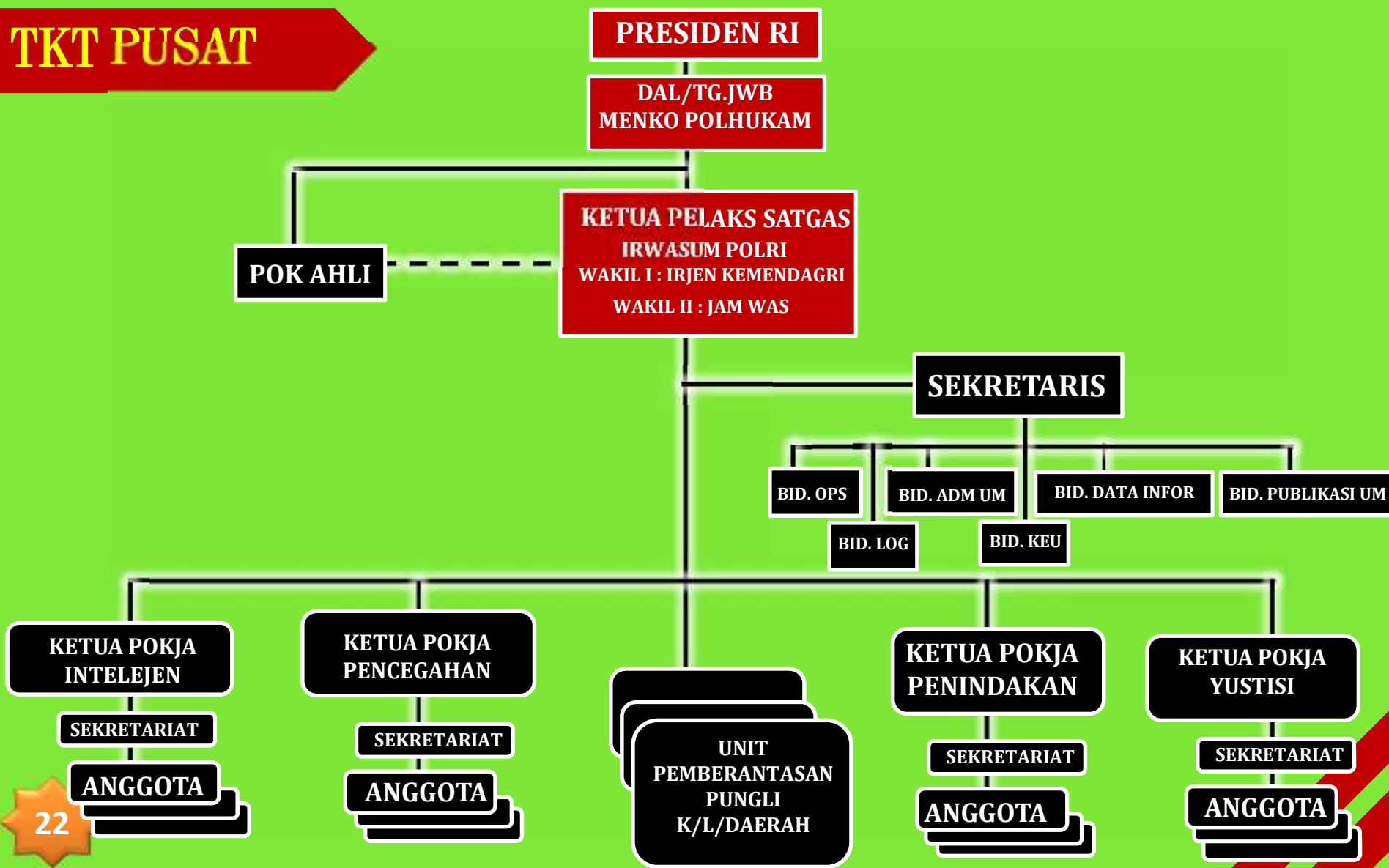




STRUKTUR ORGANISASI



TKT PUSAT





STRUKTUR ORGANISASI UPP K/L



K/L





HTCK





DATA OTT (77)



NO	UPP	KASUS	TSK	BB
	K/L			
1.	POLRI	2	3	6 M
2.	KEJAGUNG	1	1	1,5 M
	DAERAH			
1.	JABAR	9	21	17, 27 JT
2.	SULSEL	6	13	5,5 JT
3.	JATIM	4	11	2 M
4.	DIY	1	1	11,55 JT
5.	SULTENG	5	5	34 JT
6.	SUMBAR	1	1	6,12 JT
7.	NTT	1	6	4,580 JT
8.	BANTEN	1	4	13,23 JT
9.	SUMUT	3	4	365 JT
10.	KEPRI	1	2	7 JT
11.	JAMBI	5	6	2,227 JT

NO	UPP	KASUS	TSK	BB
12.	SUMSEL	1	1	5,2 JT
13.	SULUT	5	6	58,9 JT
14.	LAMPUNG	2	5	10, 7 JT
15.	RIAU	15	25	10,24 JT
16.	NTB	3	6	27,3 JT
17.	KALBAR	1	3	5 JT
18.	KALTIM	2	3	658 RB
19.	GORONTALO	1	1	36 JT
20.	MALUT	3	3	2,1 JT
21.	ACEH	2	4	30,1 JT
22.	KALTENG	2	2	300 JT



DATA OTT DI DIKBUD



1. NTT

KAMIS, 3 NOV 2016, KANTOR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAHRAGA DITANGKAP 5 ORG STAF KEPEGAWAIAN BAG UM DINAS PPO KAB. MANGGARAI BARAT (MABAR), INISIAL SI, MS, MG, NI & DH, PUNGUTAN USULAN KENAIKAN PANGKAT UNTUK PARA GURU YG BERSTATUS PNS DI KAB. MABAR, DGN BRNG BUKTI UANG TUNAI Rp. 4.580.000 & TABUNGAN Rp. 18 JT, DI KENAKAN PASAL 368 KUHP & UU NO. 31 THN 1999 DIUBAH DGN UU NO. 20 THN 2001 TTG PEMBERANTASAN TIPIKORDI TANGANI POLDA JATIM. (SIDIK, P 19)

2. SUMUT

RABU, 21 DES 2016 RUMAH PRIBADI KADIS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KAB. TAPANULI UTARA (TAPUT) DITANGKAP 3 ORG OKNUM, KADIS, KASEK SMAN 1 SIPAHUTAR & KASEK SMAN 1 KEUNTUNGAN PEMBELIAN BAGIAN RUANG KELAS BARU TAHUN 2016 UANG TUNAI Rp. 26 JT, DGN RINCIAN Rp. 10 JT DARI SMA 1 GAROGA & SMA PANGARIBU SERTA Rp. 6 JT DARI SMA 2 SIBORO BORO POLDA SUMUT (PROSES SIDIK)



LANDASAN HUKUM



NO	KETENTUAN HUKUM	JENIS	ANCAMAN PIDANA
1.	PS 2 UU NO 11 TAHUN 1980	PEMBERI SUAP	PIDANA: 5 TAHUN DENDA: 15 JUTA
2.	PS 3 UU NO 11 TAHUN 1980	PENERIMA SUAP	PIDANA: 3 TAHUN DENDA: 15 JUTA
3.	PS 368 KUHP	PEMERASAN	PIDANA: 9 TAHUN
4.	PS 5 AYAT 1 UU 31 TAHUN 1999 UU 20 TAHUN 2001	MEMBERI SUAP ATAU MENJANJIKAN HADIAH PADA PEG NEGERI / PENYELENGGARA NEGARA	PIDANA: MIN 1 TAHUN MAX. 5 TAHUN DENDA: MIN 250 JUTA MAX. 250 JUTA



LANDASAN HUKUM



NO	KETENTUAN HUKUM	JENIS	ANCAMAN PIDANA
5.	PS 5 AYAT 2 UU 31 TAHUN 1999 UU 20 TAHUN 2001	PEG. NEGERI / PENYELENGGARA NEGARA MENERIMA SUAP/HADIAH ATAU JANJI	PIDANA: MIN 1 TAHUN MAX. 5 TAHUN DENDA: MIN 250 JUTA MAX. 250 JUTA
6.	PS 11 UU 31 TAHUN 1999 UU 20 TAHUN 2001	PEG. NEGERI / PENYELENGGARA NEGARA MENERIMA HADIAH ATAU JANJI	SDA



LANDASAN HUKUM



NO	KETENTUAN HUKUM	JENIS	ANCAMAN PIDANA
7.	PS 12 a PS 12 b UU 31 TAHUN 1999 UU 20 TAHUN 2001	PEG. NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA MENERIMA HADIAH ATAU JANJI UNTUK BERBUAT SESUATU	PIDANA: MIN 4 TAHUN MAX: 20 TAHUN DENDA: MIN 200 JUTA MAX: 1 MILYAR
8.	PS 12 e UU 31 TAHUN 1999 UU 20 TAHUN 2001	PEG. NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA MELAKUKAN PEMERASAN	PIDANA: MIN 4 TAHUN MAX. 20 TAHUN DENDA: 1 MILYAR



LANDASAN HUKUM



NO	KETENTUAN HUKUM	JENIS	ANCAMAN PIDANA
9.	PS 12B UU 31 TAHUN 1999 UU 20 TAHUN 2001	PEG. NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA MENERIMA GRATIFIKASI	PIDANA: MIN 1 TAHUN MAX. 4 TAHUN DENDA: MIN 200 JUTA MAX: 1 MILYAR
10.	PS 13 UU 31 TAHUN 1999 UU 20 TAHUN 2001	MEMBERI HADIAH ATAU JANJI KEPADA PEG. NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA	PIDANA: 3 TAHUN DENDA: 150 JUTA



CALL CENTER & LAP PUS



CALL CENTER : 193 / 0821-1213-1323
SMS : 1193 / 0856-8880-881
EMAIL : lapor@saberpungli.id
Web : saberpungli.id

LAPORAN KE SATGAS PUSAT EMAIL:
saberpunglisatgas@polkam.go.id

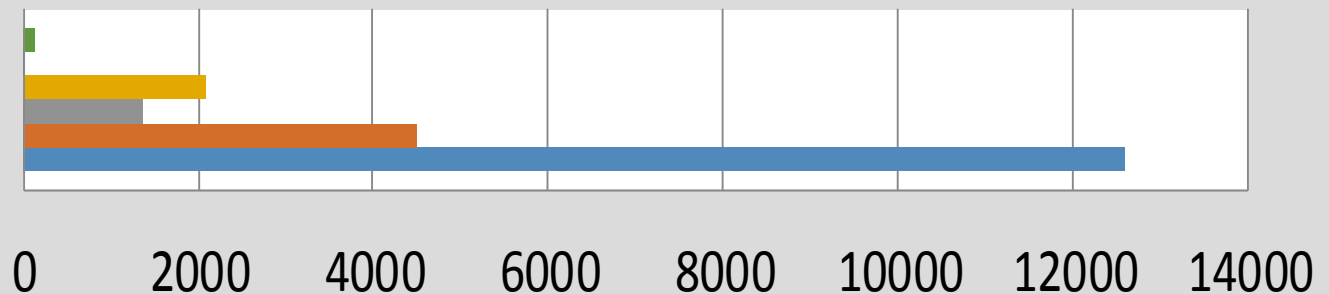


DATA LAP ADUAN KE POSKO SATGAS



LAPORAN ADUAN S.D. TGL 11 JAN 2017 PUKUL 08.00 WIB, **TOTAL 20.713**

LAPORAN PENGADUAN



LAPORAN PENGADUAN	
 SURAT POS	144
 DATANG LANGSUNG	25
 APLIKASI ANDROID	2087
 TLP	1363
 EMAIL	4503
 SMS	12591



DATA UPP K/L YG TERBENTUK



KEMENTRIAN/LEMBAGA:

1. UPP POLRI;
2. UPP KEMENKUMHAM RI;
3. UPP KEMENKOMINFO RI;
4. UPP KEMENPORA RI;
5. UPP KEMENDAGRI;
6. UPP KEMENRISTEKDIKTI RI;
7. UPP KEMEN ESDM RI;
8. UPP BPKP;
9. UPP LEMSANEG;
10. UPP BIN RI;
11. UPP BAWASLU;
12. UPP BPOM RI;
13. UPP KEJAGUNG RI;
14. UPP BMKG;
15. UPP LPP TVRI;
16. UPP PPAK;
17. UPP KEMENDIKBUD;
(kemendikbud no. 317/p/2016 tgl 27 des 2016)
18. UPP KEMENDES, PDT & TRANS;
19. UPP KEMENKO PEREKONOMIAN.



DATA UPP K/L PROV TERBENTUK



DAERAH :

1. UPP PROV. ACEH;
2. UPP PROV. SUMUT;
3. UPP PROV. SUMBAR;
4. UPP PROV. RIAU;
5. UPP PROV. KEPRI;
6. UPP PROV. JAMBI;
7. UPP PROV. BENGKULU;
8. UPP PROV. SUMSEL;
9. UPP PROV. KEP. BABEL;
10. UPP PROV. LAMPUNG;
11. UPP PROV. BANTEN;
12. UPP PROV. DKI JAKARTA;
13. UPP PROV. JABAR;
14. UPP PROV. JATENG;
15. UPP PROV. DIY;
16. UPP PROV. JATIM;
17. UPP PROV. KALBAR;
18. UPP PROV. KALTENG;
19. UPP PROV. KALTARA;
20. UPP PROV. KALTIM;
21. UPP PROV. KALSEL;
22. UPP PROV. SULUT;
23. UPP PROV. SULTRA;
24. UPP PROV. SULTENG;
25. UPP PROV. GORONTALO;
26. UPP PROV. SULSEL;
27. UPP PROV. SULBAR;
28. UPP PROV. MALUKU;
29. UPP PROV. MALUT;
30. UPP PROV. BALI;
31. UPP PROV. NTB;
32. UPP PROV. NTT;
33. UPP PROV. PAPUA;
34. UPP PROV. PAPUA BARAT.



KOMITMEN PIMPINAN



KEPEMIMPINAN MERUPAKAN KOMPONEN VITAL YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN ORGANISASI DALAM MENCAPAI TUJUANNYA. SEORANG PEMIMPIN ADALAH **FIGURE** YANG MENENTUKAN ARAH ORGANISASI, WARNA ORGANISASI TERMASUK PENGEMBANGAN KUALITAS ANGGOTA-ANGGOTA DALAM MENCAPAI TUJUAN YANG TELAH DITETAPKAN. OLEH KARENANYA **DIPERLUKAN KOMITMEN YANG KUAT SECARA TULUS DAN SUNGGUH-SUNGGUH** DALAM MENJALANKAN RODA ORGANISASI SESUAI DENGAN ATURAN. **KOMITMEN** ADALAH SUATU KETENTUAN UNTUK BERJANJI KEPADA DIRI SENDIRI YANG AKAN MEMACU SESEORANG UNTUK TERUS BERJUANG DALAM MENCAPAI TUJUAN YANG DICITA-CITAKAN.



ADA PUNGLI, LAPOR SEGERA !!



CONTOH PAMPHLET, LEAFLET & SPANDUK DALAM RANGKA CEGAH PUNGGLI

SANKSI HUKUM

PEMBERI SUAP	PIDANA 5 TAHUN DENDA 15 JUTA <small>Ps. 2 UU No. 11 tahun 1980</small>
PENERIMA SUAP	PIDANA 3 TAHUN DENDA 15 JUTA <small>Ps. 3 UU No. 11 tahun 1980</small>
PEMERASAN	PIDANA 9 TAHUN <small>Ps. 368 KUHP</small>
MEMBERI SUAP ATAU MENJANJI HADIAH PADA PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA	PIDANA MIN. 1 TAHUN MAX. 5 TAHUN DENDA MIN. 50 JUTA MAX. 250 JUTA <small>Ps. 5 ayat 1 UU 31 tahun 1999 UU 20 tahun 2001</small>
PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA MELAKUKAN PEMERASAN	PIDANA MIN. 4 TAHUN MAX 20TAHUN DENDA 1 MILYAR <small>Ps. 12E UU 31 tahun 1999 UU 20 tahun 2001</small>
PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA MENERIMA GRATIFIKASI	PIDANA MIN. 1 TAHUN MAX. 5 TAHUN DENDA MIN. 200 JUTA MAX 1 MILYAR <small>Ps. 12B UU 31 tahun 1999 UU 20 tahun 2001</small>
PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA MENERIMA HADIAH ATAU JANJI UNTUK BERBUAT SESUATU	PIDANA MIN. 4 TAHUN MAX 20TAHUN DENDA MIN. 200 JUTA MAX 1 MILYAR <small>Ps. 12A 12B UU 31 tahun 1999 UU 20 tahun 2001</small>



STOP PUNGUTAN LIAR

Ada Pungli, Laporkan Segera



CALL CENTER 193



SMS CENTER 1193

LAPOR#NAMA#NIK#TGL-BLN-TAHUN KEJADIAN#
LOKASI KEJADIAN#INSTANSI TERLAPOR#LAPORAN



saberpungli.id



MOBILE APPS



INDONESIA BEBAS DARI PUNGLI

PUNGLI??



Pungli adalah pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya dikenakan atau di pungut di lokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan.

Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana.



DAMPAK PUNGLI

- EKONOMI BIAYA TINGGI
- RUSAKNYA TATANAN MASYARAKAT
- MENGHAMBAT PEMBANGUNAN
- MASYARAKAT DIRUGIKAN
- KETIDAKPERCAYAAN MASYARAKAT KEPADA PEMERINTAH

BEBERAPA POTENSI RAWAN PUNGLI



Akta Lahir



Masuk Sekolah



Biaya Sekolah



Urus Surat Menyurat



Melamar Kerja



Menikah



SKEP Jabatan



Surat Pensiun



Surat Kematian



STOP PUNGUTAN LIAR

Ada Pungli, Laporkan Segera



CALL CENTER 193



SMS CENTER 1193

LAPOR#NAMA#NIK#TGL-BLN-TAHUN KEJADIAN#
LOKASI KEJADIAN#INSTANSI TERLAPOR#LAPORAN



saberpungli.id



MOBILE APPS



INDONESIA BEBAS DARI PUNGLI

STOP PUNGUTAN LIAR

Ada Pungli, Laporkan Segera



CALL CENTER 193



saberpungli.id



SMS CENTER 1193

LAPOR#NAMA#NIK#TGL-BLN-TAHUN KEJADIAN#
LOKASI KEJADIAN#INSTANSI TERLAPOR#LAPORAN



MOBILE APPS



INDONESIA BEBAS DARI PUNGLI



Sekian & Terima Kasih

